PENGUATAN KELEMBAGAAN NAGARI DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS TECHNOPRENEURSHIP MELALUI UP2K DI NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG

Hasrul[1], Al Rafni[2], Suryanef[3], Azwar Ananda[4], Zaky Farid Luthfi[5], Oktaviani Puspita Sari[6], Tetti Eka Purnama[7]

[1,2,3,4,5,6,7]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : hasrulpiliang@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) merupakan bentuk hilirisasi hasil penelitian mengenai penguatan pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang diarahkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat nagari. Program ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat, penataan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pemberdayaan masyarakat adat sebagai basis pemerintahan nagari, serta pengembangan technopreneurship dalam penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melemahnya kondisi ekonomi masyarakat nagari akibat pandemi Covid-19, khususnya di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya peran pemerintah nagari dan BUMNag dalam penguatan ekonomi masyarakat, rendahnya kapasitas badan legislatif nagari dalam penyusunan RPJM dan RKP Nagari yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah nagari, BUMNag, badan legislatif nagari, serta kelompok UP2K melalui pelatihan, workshop, pendampingan, focus group discussion (FGD), dan assessment. Selain itu, penguatan technopreneurship dilakukan melalui penyusunan business plan, manajemen pemasaran digital, pengelolaan keuangan, serta pengembangan usaha masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang lebih efektif, meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi nagari, dan berkembangnya usaha masyarakat berbasis teknologi sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat nagari. Luaran penelitian mencakup publikasi ilmiah internasional, publikasi media massa, dan dokumentasi video kegiatan secara daring.

Kata Kunci : *Pemerintahan Nagari, BUMNag, Technopreneurship, Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Ekonomi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pemerintahan nagari di Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat, terutama dalam penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat adat. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai unit pemerintahan terendah, tetapi juga sebagai lembaga sosial budaya yang menjadi basis pengelolaan kehidupan masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pemerintahan nagari menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat nagari.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintahan nagari masih menghadapi sejumlah persoalan dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian Akmal dan Hasrul (2007) tentang *Model Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai Kelompok Rentan di Nagari-Nagari Sumatra Barat* menunjukkan bahwa kemampuan pemerintahan nagari dalam memberikan penguatan ekonomi kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, masih relatif rendah. Selanjutnya, penelitian Al Rafni dan Suryanef (2005) mengenai *Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat* menemukan berbagai kendala dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang efektif dan efisien, terutama rendahnya kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Penelitian multi years Suryanef dan Al Rafni dkk. (2009–2011) tentang *Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat* juga menunjukkan bahwa masyarakat adat di nagari masih berada dalam kondisi marjinal, terutama dalam memahami penyusunan peraturan nagari yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Ketiga penelitian tersebut merekomendasikan perlunya penguatan pemerintahan nagari sebagai basis peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Selain itu, penelitian Sari (2021) tentang *Technopreneurship: The Influence of Partnership Strategy on Agricultural Start Up's Business Success and Its Implications with the Community Economic Resilience* menemukan bahwa perkembangan perusahaan rintisan (*start up*) di Indonesia belum sepenuhnya dapat diakses oleh kelompok ekonomi masyarakat yang memiliki literasi digital rendah. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa strategi kemitraan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha dan ketahanan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan technopreneurship dipandang penting untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat berbasis teknologi dan kemitraan.

Permasalahan penguatan ekonomi masyarakat nagari semakin kompleks sejak terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya hubungan kemitraan antara pemerintah nagari, BUMNag, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah nagari dan BUMNag belum mampu berperan secara maksimal sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas badan legislatif nagari dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat juga masih terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) belum berjalan secara optimal.

Nagari Kunangan Parik Rantang merupakan salah satu nagari di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Nagari Kunangan Parik Rantang. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 18.016 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 10.820 jiwa. Sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, wiraswasta, karyawan swasta, serta pelaku usaha jasa lainnya. Kondisi pendidikan masyarakat relatif baik dengan rata-rata telah menempuh pendidikan formal hingga jenjang sarjana.

Dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga, masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang membentuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada tahun 2019. Kelompok ini melibatkan unsur pemerintah nagari, PKK, kader, dan pelaku usaha masyarakat. Berbagai produk UMKM telah dikembangkan, seperti batik Ceta Bacorak, kerupuk, keripik tempe, jamu, tas tali kur, sabun pencuci piring, dan produk makanan lainnya. Namun demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek manajemen usaha, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan pemerintahan nagari, BUMNag, badan legislatif nagari, serta kelompok UP2K melalui pendekatan technopreneurship. Penguatan dilakukan melalui pelatihan, workshop, pendampingan, focus group discussion (FGD), dan assessment untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis teknologi digital. Dengan demikian, diharapkan terwujud pemerintahan nagari yang lebih efektif, penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, serta peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat nagari secara berkelanjutan.

METODE

Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) dilaksanakan selama tiga tahun dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah nagari, badan legislatif nagari, BUMNag, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dan pelaku UMKM. Pada tahun pertama kegiatan difokuskan pada penguatan kelembagaan pemerintahan nagari, BUMNag, dan badan legislatif nagari melalui peningkatan kapasitas dalam penyusunan RPJM dan RKP Nagari serta penguatan penggunaan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Tahun kedua difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kapasitas UMKM dalam manajemen produksi, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital. Selanjutnya, tahun ketiga diarahkan pada penguatan kemitraan antara pemerintah nagari, BUMNag, dan kelompok UP2K dalam mendukung pengembangan ekonomi nagari berbasis technopreneurship.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan, workshop, brainstorming, Focus Group Discussion (FGD), dan assessment. Penyuluhan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam tata kelola pemerintahan nagari, pengelolaan usaha, manajemen keuangan, dan pemasaran digital. Pendampingan dan workshop dilakukan sebagai proses praktik langsung dalam penyusunan

perencanaan pembangunan nagari, pengembangan business plan, serta strategi pengembangan UMKM. Sementara itu, FGD dan assessment digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi bersama, serta mengevaluasi keberhasilan program dalam memperkuat kelembagaan pemerintahan nagari dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) tahun pertama difokuskan pada penguatan kelembagaan pemerintahan nagari dan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Kegiatan diawali dengan kunjungan pertama pada 2 Juli 2022 yang dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Kunangan Parik Rantang. Kegiatan ini melibatkan tim pengabdian, perangkat nagari, dan anggota kelompok UP2K melalui orientasi program dan Focus Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD, ditemukan bahwa kelompok UP2K telah memiliki berbagai produk UMKM, seperti batik Ceta Bacorak, produk kuliner, dan kerajinan rumah tangga, namun pengembangannya masih terkendala dalam aspek pemasaran, permodalan, dan pemanfaatan teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi masyarakat tidak hanya membutuhkan sumber daya ekonomi, tetapi juga dukungan kelembagaan pemerintahan yang kuat.



Gambar 1. Kunjungan Pertama Dialog Kebutuhan Masyarakat Nagari

Secara teoritis, penguatan kelembagaan pemerintahan lokal merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut teori pemberdayaan masyarakat (community empowerment), pembangunan yang efektif harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan didukung oleh institusi lokal yang mampu menjalankan fungsi pelayanan,

fasilitasi, dan pemberdayaan secara optimal. Dalam konteks nagari, pemerintah nagari dan BUMNag memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal. Namun, hasil kegiatan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintahan nagari masih belum optimal, terutama dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada penguatan UMKM dan ekonomi masyarakat.



Gambar 2. Kunjungan Ke 2 Menyusun Kebijakan Nagari

Kunjungan kedua dilaksanakan pada 1–2 Agustus 2022 di Wana Wisata Telabang. Pada sesi pertama dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama perangkat nagari terkait penguatan peraturan nagari (Pernag) sebagai dasar hukum pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat. Hasil diskusi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyusun kebijakan nagari yang mendukung pengembangan UMKM, khususnya produk unggulan seperti batik Ceta Bacorak. Pemerintah nagari telah memberikan dukungan berupa bantuan pendanaan dan peralatan produksi, namun belum didukung oleh regulasi dan perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Konsep good governance menekankan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah nagari perlu memiliki kemampuan dalam menyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari yang berbasis pada potensi lokal masyarakat. Dalam kegiatan ini ditemukan bahwa pemetaan

potensi ekonomi nagari, seperti sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata, masih belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, berbagai potensi ekonomi nagari belum mampu dikembangkan secara maksimal sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perencanaan pembangunan nagari menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi masyarakat.

Pada sesi kedua kunjungan kedua dilakukan workshop pengembangan motif batik dan digital marketing bagi anggota kelompok UP2K. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas produk serta kemampuan pemasaran berbasis teknologi digital. Hasil workshop menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pemasaran produk UMKM. Akan tetapi, keterbatasan literasi digital dan akses teknologi masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan teori technopreneurship yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan usaha berbasis teknologi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan inovasi digital untuk produksi dan pemasaran usaha.

Selain kendala pemasaran, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya berbagai persoalan dalam pengembangan sektor ekonomi lainnya, seperti keterbatasan modal usaha, lemahnya manajemen produksi, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Pada sektor pertanian, masyarakat menghadapi kendala terkait subsidi pupuk dan pendampingan petani, sedangkan pada usaha produksi tahu ditemukan permasalahan dalam manajemen produksi dan permodalan usaha. Pada sektor pariwisata, pengembangan objek wisata nagari juga terkendala oleh keterbatasan dana, akses lokasi, dan dampak pandemi Covid-19. Menurut teori pembangunan ekonomi lokal (local economic development), keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha dalam mengembangkan potensi lokal secara terpadu. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah nagari, BUMNag, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi nagari.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) tahun pertama menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan pemerintahan nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui technopreneurship dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat nagari. Kegiatan pelatihan, workshop, pendampingan, dan FGD mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah nagari dan kelompok UMKM. Dengan adanya penguatan kelembagaan pemerintahan nagari yang didukung oleh pengembangan usaha berbasis teknologi, diharapkan masyarakat mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) di Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan pemerintahan nagari dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis technopreneurship memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat nagari. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, workshop, pendampingan, dan Focus Group Discussion (FGD), pemerintah nagari, BUMNag, dan kelompok UP2K memperoleh peningkatan

pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan pemerintahan, pengembangan UMKM, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Nagari Kunangan Parik Rantang memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, seperti produk batik Ceta Bacorak, kuliner, kerajinan, pertanian, dan objek wisata nagari. Namun demikian, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan permodalan, rendahnya literasi digital, lemahnya manajemen usaha, belum optimalnya regulasi nagari, serta keterbatasan infrastruktur dan akses pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan pemerintahan nagari dan sinergi antara pemerintah nagari, BUMNag, dan masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi nagari secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kemitraan antara pemerintah nagari dan kelompok UMKM dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Penguatan kelembagaan pemerintahan nagari yang didukung oleh penerapan technopreneurship diharapkan dapat menjadi strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat nagari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang (UNP) yang telah memberikan dukungan dan pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) melalui kontrak pengabdian Nomor 1294/UN35.13/PM/2022.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, & Hasrul. (2007). *Model perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagai kelompok rentan di Sumatera Barat: Laporan penelitian hibah bersaing XV/1 perguruan tinggi tahun anggaran 2007 bidang sosial*. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Al Rafni, & Suryanef. (2005). *Pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat*. Balitbang Provinsi Sumatera Barat.

Suryanef, Al Rafni, et al. (2009–2011). *Pemberdayaan masyarakat adat sebagai basis penataan penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat*. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.

Sari, O. P. (2021). Technopreneurship: The influence of partnership strategy on agricultural start up's business success and its implications with the community economic resilience. *International Journal of Arts and Social Science*.

Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. (2003). *Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Nagari Kunangan Parik Rantang di Kecamatan Kamang Baru*.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*.

Sujito, A. (2004). *Membangun kemandirian dalam ekonomi adat*. Makalah disampaikan pada Lokalatih Penguatan Ekonomi Masyarakat Nagari dalam Perubahan Kedepan, Hotel Kharisma, Bukittinggi, 18–21 Maret 2004.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.

Robiyanto, F. (2004). *Akuntansi praktis untuk usaha kecil dan menengah*. Studi Nusa.

Wahyuningsih, S. (2009). Peran UKM dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 5*(1), 3–10.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 16 Ayat (1)*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.

Fowosire, R. A., Idris, O. Y., & Elijah, O. (2017). *Technopreneurship: A view of technology, innovations and entrepreneurship*. Global Journals. https://globaljournals.org/GJRE_Volume17/5-Technopreneurship-A-View-ofTechnology.pdf

Tim Pengembangan Technopreneur ITS. (2015). *Technopreneurship*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. https://careers.its.ac.id/media/publikasi/Technopreneurship.pdf

Baihaqi, I. (2015). *Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni (LP2KHA)*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.